



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 141 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.



12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RKPD Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Sistematika Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. Penutup.
- (3) Rincian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melaksanakan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 141 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 141 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA TAHUN 2022

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah rencana pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan, arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel, sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum yakni mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara yakni menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
3. Asas Kepentingan Umum yakni mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

4. Asas Keterbukaan yakni membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas yakni mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Asas Profesionalitas yakni mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas yakni setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi yakni berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektifitas yakni berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna; dan
10. Asas Keadilan yakni setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Tahapan dan proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diawali dengan :

- a. Persiapan penyusunan dengan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/138/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2022;
- b. Penyusunan Rancangan awal;
- c. Penyusunan Rancangan Renja;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan Rencana Kerja.

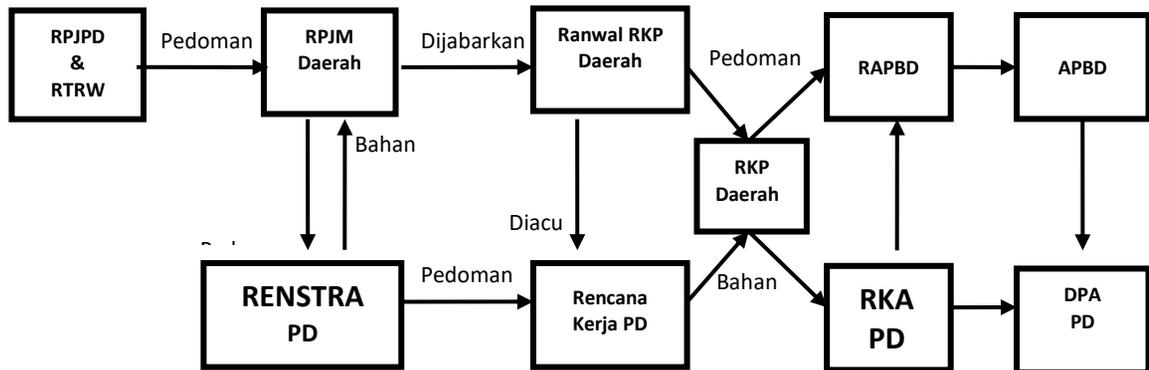
Dasar surat untuk proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022 adalah 1) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nomor: 005/7865/35.07.032/2020, tanggal 25 November 2020 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan RKPD Kabupaten Malang; 2) Surat Edaran Bupati Malang, Nomor 2139 Tahun 2021, tanggal 26 Februari 2021 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022; 3) Surat Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Nomor: 050/1900/35.07.202/2021, tanggal 17 Maret 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022; 4) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nomor: 005/4005/35.07.032/2021, tanggal 18 Mei 2021 tentang Rapat Koordinasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok

pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan digambarkan pada tabel dibawah ini :

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2022 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
3. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Rentra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020, capaian kinerja kegiatan sebesar 93,16% dan realisasi anggaran sebesar Rp.18.721.983.296,- atau mencapai 93,64% dari total anggaran sebesar Rp. 19.992.865.860,-

Capaian kinerja pada tahun berjalan (Tahun 2021) masih mencapai 23,68% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.525.420.912,00 (33,39%). Capaian kinerja dan anggaran masih sangat rendah karena adanya pandemic Covid-19 dan adanya PPKM yang membatasi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan peserta.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2400 buah	2300 buah	2350 buah	2350 buah	100	2400 buah	7050 buah	293,00
1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	363 ob	366 ob	159 ob	159 ob	100	363 ob	888 ob	244,62
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	12 ob	12 ob	12 ob	100	12 ob	36 ob	300,00
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	10076 jenis	5806 jenis	47 jenis	47 jenis	100	1950 jenis	7803 jenis	77,44

1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32720 jenis	2415 jenis	5 jenis	5 jenis	100	32720 jenis	35140 jenis	107,40
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	60 jenis	50 jenis	6 jenis	6 jenis	100	60 jenis	116 jenis	193,33
1.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1584 jenis	1584 jenis	2 jenis	2 jenis	100	1584 jenis	3170 jenis	200,12
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	13500 hok	13000 hok	5090 hok	5090 hok	100	13500 hok	31590 hok	234,00
1.9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	165 hok	146 hok	429 hok	429 hok	100	165 hok	740 hok	448,48
1.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	575 hok	499 hok	850 hok	850 hok	100	575 hok	1924 hok	334,60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	8 unit	6 unit	12 unit	12 unit	100	1 unit	1 unit	162,50
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100	0 Unit	0 Unit	100,00
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	18 jenis	17 jenis	15 jenis	15 jenis	100	18 jenis	50 jenis	277,70

2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	19 unit	17 unit	23 unit	23 unit	100	19 unit	59 unit	310,52
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 jenis	12 jenis	2 jenis	2 jenis	100	30 jenis	44 jenis	146,66
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	3 jenis	75,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	53 Stel	54 Stel	58 Stel	0 Stel	0	53 Stel	107 Stel	201,88
3.2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	209 stel	54 Stel	56 Stel	56 stel	100	53 stel	163 stel	78,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	100	25 orang	75 orang	300,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 Buku	12 Buku	12 Buku	12 Buku	100	12 Buku	36 Buku	300,00

5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100	1 buku	3 buku	300,00
5.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100	1 buku	3 buku	300,00
6	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100%	100%	83.33%	100%	120	100%	100%	100,00
6.1	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	15 Kec.	4 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	100	15 Kec.	29 Kec.	193,30
6.2	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun.	33 Kec.	33 Kec.	33 Kec.	33 Kec.	100	33 Kec.	99 Kec.	300,00
6.3	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	130 desa	78 desa	26 desa	26 desa	100	26 desa	130 desa	100,00
7	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	100%	100%	76%	76%	100	100%	100%	100,00
7.1	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	18 desa	14 desa	378 desa	378 desa	100	18 desa	410 desa	227,00
7.2	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	18 desa	51 desa	12 desa	12 desa	100	4 desa	67 desa	372,00
7.3	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	33 Kec. 16 desa	20 Kec. 0 desa	12 Kec. 20 desa	12 Kec. 20 desa	100 100	33 Kec. 16 desa	65 Kec. 36 desa	196,00 225,00

8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00
8.1	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid Jumlah Kendaraan Operasional Roda Dua Yang diserahkan kepada Permerintah Desa	378 Desa 20 Desa 390 Desa/Kel. 0 Unit	378 Desa 8 Desa 390 Desa/Kel. 0 Unit	378 Desa 3 Desa 390 Desa/Kel 378 Unit	378 Desa 1 Desa 0 Desa/Kel. 378 Unit	100 33,33 100 100	378 Desa 3 Desa 390 Desa/Kel 0 Unit	1134 Desa 12 Desa 780 Desa/Kel. 378 Unit	300,00 60,00 200,00 100,00
8.2	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	378 Desa	378 Desa	378 Desa	100	378 Desa	1134 Desa	300,00
8.3	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 Kec	378 Kec	10 Kec	10 Kec	100	10 Kec	10 Kec	100,00
9	Program Pengembangan Potensi Desa	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	100%	100%	81.4%	81.4%	100	100%	100%	100,00
9.1	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	8 desa	14 desa	12 desa	12 desa	100	8 desa	34 desa	425,00
9.2	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang.	4 desa 140 desa	42 desa 378 desa	6 desa 131 desa	6 desa 131 desa	100 100	4 desa 140 desa	4 desa 140 desa	100,00 100,00
9.3	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG	1 unit 12 desa	0 unit 12 desa	0 unit 12 desa	0 unit 12 desa	0 100	1 unit 12 desa	0 unit 12 desa	0 100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah membantu pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah, rentan miskin, marginal dan kaum muda pencari kerja serta kelompok perempuan agar mereka bisa lebih mandiri, maka orientasi pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada masyarakat perdesaan dengan menggunakan strategi pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need approach*), pengembangan inspirasi dan partisipasi masyarakat (*bottom up approach*), pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat (*community institutional approach*), berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat (*prosperity approach*), pendekatan lintas sektoral dan program (*cross sectoral program approach*), pendayagunaan teknologi tepat guna (*appropriate technology approach*) serta pemberdayaan masyarakat perkotaan dan perdesaan (*rural and urban community approach*).

Berdasarkan Indikator kinerja yang ditetapkan dalam IKU dan IKD, capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Malang**

No	Indikator)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -		Proyeksi Tahun Ke -		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Eselon II : Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju			4 Desa	4 Desa	-	-	32 Desa	-	-	-	
1	Eselon III : Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100%	100%	-	-	100%	-	-	-	
	Eselon IV : Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)			2350 buah	2400 buah	-	-	2350 buah	-	-	-	
	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)			363 OB	363 OB	-	-	363 OB	-	-	-	
	Jumlah petugas kebersihan (OB)			12 OB	12 OB	-	-	12 OB	-	-	-	
	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			1,945 Jenis	1950 jenis	-	-	1,945 Jenis	-	-	-	
	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)			32,710 Jenis	32.720 jenis	-	-	32,710 Jenis	-	-	-	
	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)			55 Jenis	60 jenis	-	-	55 Jenis	-	-	-	

	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)		1,584 Jenis	1,584 Jenis	-	-	1,584 Jenis	-	-	-	
	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)		12,090 HOK	12,090 HOK	-	-	12,090 HOK	-	-	-	
	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)		150 HOK	155 HOK	-	-	150 HOK	-	-	-	
	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)		425 HOK	450 HOK	-	-	425 HOK	-	-	-	
2	Eselon III : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	100%	-	-	100%	-	-	-	
	Eselon IV : Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)		2 Unit	1 Unit	-	-	2 Unit	-	-	-	
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)		16 Jenis	17 Jenis	-	-	16 Jenis	-	-	-	
	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)		17 Unit	18 Unit	-	-	17 Unit	-	-	-	
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)		30 Jenis	30 Jenis	-	-	30 Jenis	-	-	-	
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)		1 Jenis	1 Jenis	-	-	1 Jenis	-	-	-	
3	Eselon III : Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	100%	-	-	100%	-	-	-	
	Eselon IV : Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)		53 Stel	53 Stel	-	-	53 Stel	-	-	-	
	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)		53 Stel	53 Stel	-	-	53 Stel	-	-	-	
4	Eselon III : Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	100%	-	-	100%	-	-	-	

	Eselon IV : Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)			25 orang	25 orang	-	-	25 orang	-	-	-	
5	Eselon III : Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)			100%	100%	-	-	100%	-	-	-	
	Eselon IV : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)			12 Buku	12 Buku	-	-	12 Buku	-	-	-	
	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)			1 Buku	1 Buku	-	-	1 Buku	-	-	-	
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)			1 Buku	1 Buku	-	-	1 Buku	-	-	-	
6	Eselon III : Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.			100%	100%	-	-	100%	-	-	-	
	Eselon IV : Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.			-	12 Desa	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa			378 Desa	378 Desa	-	-	378 Desa	-	-	-	
	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-undangan desa			378 Desa	378 Desa	-	-	378 Desa	-	-	-	
	Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid			390 Ds/Kel.	390 Ds/Kel.	-	-	390 Ds/Kel.	-	-	-	
	Jumlah desa berprestasi tingkat Kabupaten			3 Desa	3 Desa	-	-	3 Desa	-	-	-	
	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa			378 Desa	378 Desa	-	-	378 Desa	-	-	-	
	Jumlah aset desa yang didata			75Desa	75 Desa	-	-	75 Desa	-	-	-	

7	Eselon III : Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa			83,33 %	100%	-	-	83,33 %	-	-	-	
	Eselon IV : Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K			26 Desa	26 Desa	-	-	26 Desa	-	-	-	
	Jumlah pembinaan lembaga adat desa			10 Kec.	15 Kec	-	-	10 Kec.	-	-	-	
	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah swadaya masyarakat.			33 Kec.	33 Kec.	-	-	33 Kec.	-	-	-	
8	Eselon III : Persentase peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			81.4%	100%	-	-	81.4%	-	-	-	
	Eselon IV : Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan			8 Desa	8Desa	-	-	8 Desa	-	-	-	
	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa			4 Desa	4 Desa	-	-	4 Desa	-	-	-	
	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)			378 desa	378 desa	-	-	378 desa	-	-	-	
	Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG			12 unit	12 unit	-	-	12 unit	-	-	-	

10	Eselon III : Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.			100%	100%	-	-	100%	-	-	-	
	Eselon IV : Jumlah BUMDesa yang dibentuk.			18 Desa	18 Desa	-	-	18 Desa	-	-	-	
	Jumlah pelatihan usaha sektor informal			4 Desa	4 Desa	-	-	4 Desa	-	-	-	
	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat			20 Desa	20 Desa	-	-	20 Desa	-	-	-	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur dengan pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, yaitu meningkatnya desa berkembang menjadi desa maju. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran, diperlukan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan masing-masing indikator yang dirumuskan.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

- a. Belum optimalnya pembangunan desa yang mendukung Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Desa;
- b. Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- c. Belum semua desa membentuk BUMDesa serta BUMDesa yang sudah terbentuk masih perlu pembinaan untuk kemajuan BUMDesa;
- d. Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa;
- e. Belum optimalnya pengembangan potensi desa/sumber daya desa.

Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

- a. Meningkatnya jumlah desa maju Kabupaten Malang
- b. Meningkatnya jumlah desa berkembang menjadi maju.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :

- a. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
- b. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait;
- c. Masih belum optimalnya pemahaman aparatur pemerintah desa terhadap regulasi;
- d. Masih tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin;
- e. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Malang.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :

- a. Komitmen dan political will Pemerintah Kabupaten Malang dalam pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. Regulasi tentang Pemberdayaan Masyarakat baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun Daerah;
- c. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Dukungan dari Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.4 Review Terhadap RKPD

Rancangan Kerja Pemerintah Daerah telah disusun pada akhir tahun sebelum awal tahun kegiatan berjalan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan situasi dan kondisi, maka Rancangan Kerja Pemerintah Daerah tersebut perlu mendapatkan review. Adapun review terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Malang**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah.	100%	6.868.740.932,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah.	100%	6.868.740.932,00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu		150.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu		150.000.000,00	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	22.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	22.000.000,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	8.000.000,00	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	8.000.000,00	

1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	8.000.000,00	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	8.000.000,00	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	23.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	23.000.000,00	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	73.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	73.000.000,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat.		5.650.212.072,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat.		5.650.212.072,00	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun Jumlah ASN yang Menerima tunjangan dalam satu tahun	396 OB 396 OB	5.009.243.732,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun Jumlah ASN yang Menerima tunjangan dalam satu tahun	462 OB 462 OB	5.009.243.732,00	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	186 OB	632.395.340,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	180 OB	632.395.340,00	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	100 Dokumen	2.382.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	135 Dokumen	2.382.000,00	

1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	3.000.000,00	
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 Dokumen	1.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 Dokumen	1.000.000,00	
1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran disusun	14 Dokumen	2.191.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran disusun	14 Dokumen	2.191.000,00	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		5.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		5.000.000,00	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	2 Dokumen	1.500.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	2 Dokumen	1.500.000,00	
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	10 Dokumen	3.500.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	4 Dokumen	3.500.000,00	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		66.002.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		66.002.000,00	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	65 Stel	55.176.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	65 Stel	55.176.000,00	

1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	65 Dokumen	3.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	65 Dokumen	3.000.000,00	
1.4.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	33 Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	33 Dokumen	5.000.000,00	
1.4.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	25 Orang	2.826.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	25 Orang	2.826.000,00	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		603.892.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		603.892.500,00	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	60 Buah	2.940.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	31 Buah	2.940.000,00	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1950 Buah	69.456.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1950 Buah	69.456.500,00	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	32.000 Buah	23.323.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	32.000 Buah	23.323.000,00	
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Eksemplar	6.244.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	446 Eksemplar	6.244.000,00	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kab. Malang, Semua	Jumlah rapat koordinasi dan	600 HOK	499.929.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kab. Malang, Semua	Jumlah rapat koordinasi dan	600 HOK	499.929.000,00	

	dan Konsultasi SKPD	Kecamatan, Semua Kelurahan	konsultasi yang difasilitasi			dan Konsultasi SKPD	Kecamatan, Semua Kelurahan	konsultasi yang difasilitasi			
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	2.500 Dokumen	2.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	2.500 Dokumen	2.000.000,00	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		67.588.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		67.588.000,00	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 Unit	27.670.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 Unit	27.670.000,00	
1.6.2	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang diadakan	32 Unit	20.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang diadakan	32 Unit	20.000.000,00	
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit	19.918.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit	19.918.000,00	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		248.877.360,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		248.877.360,00	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	2500 OK	13.875.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	2500 OK	13.875.000,00	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang	13.512 OK	235.002.360,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang	13.512 OK	235.002.360,00	

		Semua Kelurahan	disediakan				Semua Kelurahan	disediakan			
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		77.169.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		77.169.000,00	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	26 Unit	61.150.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	26 Unit	61.150.000,00	
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gadung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gadung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	25 Unit	6.019.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	25 Unit	6.019.000,00	
2	Program Penataan Desa		Persentase fasilitasi penataan desa	100%	40.000.000,00	Program Penataan Desa		Persentase fasilitasi penataan desa	100%	40.000.000,00	
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah Fasilitasi Tata Wilayah dan Penataan Kewenangan Desa		40.000.000,00	Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah Fasilitasi Tata Wilayah dan Penataan Kewenangan Desa		40.000.000,00	
2.1.1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi pembuatan tugu tapal batas desa	33 Desa	20.000.000,00	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi pembuatan tugu tapal batas desa	33 Desa	20.000.000,00	
2.1.2	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah monitoring dan evaluasi Penataan Kewenangan Desa	33 Desa	20.000.000,00	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah monitoring dan evaluasi Penataan Kewenangan Desa	33 Desa	20.000.000,00	

3	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	100%	154.000.000,00	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	100%	154.000.000,00	
3.1	Fasilitas Kerja sama antar Desa	DPMD	Jumlah Fasilitas Kerjasama Antar Desa		154.000.000,00	Fasilitas Kerja sama antar Desa	DPMD	Jumlah Fasilitas Kerjasama Antar Desa		154.000.000,00	
3.1.1	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pendampingan pengembangan kawasan perdesaan	8 Desa	154.000.000,00	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pendampingan pengembangan kawasan perdesaan	8 Desa	154.000.000,00	
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase fasilitas dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa		1.281.920.800,00	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase fasilitas dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa		1.311.801.800,00	
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1.281.920.800,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1.311.801.800,00	
4.1.1	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	285.000.000,00	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	33 Desa	20.000.000,00	
4.1.2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa pelatihan aparatur pemerintahan desa	378 Desa	251.530.000,00	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hokum desa	66 Desa	20.000.000,00	
4.1.3	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BUMDesa Bersama yang dibina Jumlah BUMDesa yang dibina	29 Unit 75 Desa	281.524.900,00	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan desa	66 Desa	29.881.000,00	
4.1.4	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan kepala desa	12 Desa	41.866.000,00	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	265.000.000,00	
4.1.5	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data profil desa/kelurahan yang valid Pemutakhiran data indeks desa membangun (IDM)	390 Desa/ Kelurahan 378 Desa	167.999.900,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa pelatihan aparatur pemerintahan desa	378 Desa	283.396.000,00	

4.1.6	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah aset desa yang didata	33 Desa	94.000.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BUMDesa Bersama yang dibina Jumlah BUMDesa yang dibina	29 Unit 75 Desa	281.524.900,00	
4.1.7	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	3 Desa	160.000.000,00	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan kepala desa	0 Desa	0	
4.1.8						Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data profil desa/kelurahan yang valid Pemutakhiran data indeks desa membangun (IDM)	390 Desa/Kelurahan 378 Desa	167.999.900,00	
4.1.9						Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah aset desa yang didata	75 Desa	94.000.000,00	
4.1.10						Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	3 Desa	150.000.000,00	
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100%	1.154.881.000,00	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100%	1.125.000.000,00	
5.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang		Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.		1.154.881.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang		Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.		1.125.000.000,00	

	Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dan Daerah Kabupaten/Kota					Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dan Daerah Kabupaten/Kota					
5.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LKD Jumlah Fasilitasi Kader Pembangunan Manusia Jumlah Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Jumlah pembinaan lembaga adat desa	26 Desa 378 Desa 33 Desa 10 Desa	310.000.000,00	
5.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LKD Jumlah Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Jumlah pembinaan lembaga adat desa	26 Desa 33 Desa 10 Desa	290.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa Jumlah Pelatihan Pengembangan Usaha Sektor Informal	30 Desa 6 Desa 8 Desa	280.000.000,00	
5.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa Jumlah Pelatihan Pengembangan Usaha Sektor Informal	20 Desa 6 Desa 4 Desa	329.881.000,00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa pemanfaat/penerima bantuan peralatan TTG Jumlah workshop TTG Sosialisasi Posyantek	12 Desa 1 Kali 1 Kali	200.000.000,00	

5.1.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa pemanfaat/penerima bantuan peralatan TTG Jumlah pelatihan posyantek	12 Desa 1 Kali	200.000.000,00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan Jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun	33 Kecamatan	225.000.000,00	
5.1.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan Jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun	33 Kecamatan	225.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas LKD dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	1 Kali	10.000.000,00	
5.1.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas LKD dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	1 Kali	10.000.000,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	35 Kali	100.000.000,00	
5.1.7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	35 Kali	100.000.000,00						
	JUMLAH				9.499.542.732,00					9.499.542.732,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat merupakan usulan pembangunan dari Desa/Kelurahan yang dibahas dalam forum Musrenbang Kecamatan.

Usulan kegiatan yang diakomodir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah usulan kegiatan yang sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Usulan program kegiatan dari Desa/Kelurahan telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan akan menjadi program dan kegiatan dinas.

Daftar usulan program dan kegiatan pembangunan dari Desa/Kelurahan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
**Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan
 Tahun 2022**

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Suharto	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Pentingnya Pengetahuan Administrasi	Desa Sukodono, Kab. Malang, Dampit, Sukodono	
2	Arif Sukmawanto	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pembuatan Po (pupuk Organik) Dan Pengembangan Budidaya Stroberry	Kab. Malang, Lawang, Turirejo	
3	Arif Sukmawanto	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah Agar Masyarakat Mengetahui Pemilahan Sampah Yang Memiliki Nilai Ekonomi Dan Secara Nyata Dapat Menciptakan Lingkungan Yang Lebih Asri Dan Sehat	Jl. Anjasmoro 43 Turirejo, Lawang, Kab. Malang, Lawang, Turirejo	
4	Adek Purwanto	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Belum terbentuknya rumah curhat dan kurangnya pemantapan mengenai administrasi lembaga PKK	Desa Tirtoyudo Jl. Samudra No.01, Kab. Malang, Tirtoyudo, Tirtoyudo	
5	Burhanuddin	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	masih banyak anggota yang belum paham dengan administrasi	Desa Talangsuko, Kab. Malang, Turen, Talangsuko	
6	Hosen	Pemberdayaan Masyarakat dan	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai	1	Organisasi Perempuan Agar lebih pro aktif	Kantor Desa Sumberkerto Kec. Pagak, Kab. Malang,	

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Desa	pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb			Pagak, Sumberkerto	
7	Sukoharyono	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	Pelatihan LPMD 13 Org, RT dan RW, 125 Org. Lembaga Adat dan KPM 15 Orang.	Desa Pamotan, Kab. Malang, Dampit, Pamotan	
8	Suwanto	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Kurang terlatihnya kepengurusan BUMDes sehingga akan sangat sulit untuk mengembangkan BUMDes dan tidak ada kemajuan sama sekali, maka dari itu sangat pentingnya Bimtek pengurus BUMDes ini	Balai Desa Klepu Rt 01 Rw 01, Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Klepu	
9	Tuwuhadi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Perjalanan BUMDESA masih jalan ditempat	Desa Jambuwer, Kab. Malang, Kromengan, Jambuwer	
10	Gaguk	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Untuk menambah pengetahuan dalam Pengelolaan BUMDes	Desa Kaliasri, Kab. Malang, Kalipare, Kaliasri	
11	Imam	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Desa Jambesari masih dini dalam pengembangan BUMDesa karena masih baru di bentuk maka perlu bimbingan teknis pengurus BUMDesa untuk mewujudkan/memajukan BUMDesa Jambesari disamping itu kelompok ekonomi produktif di Desa Jambesari dapat di tampung di BUMDesa untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo, Kab. Malang, Poncokusumo, Jambesari	
12	Jiran	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	kurang maksimalnya fungsi kelembagaan masyarakat	desa purworejo, Kab. Malang, Donomulyo, Purworejo	
13	Muhammad Baihaqi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Dibutuhkan 1 unit gedung/kantor BUMDES ,pelatihan sebanyak 20 orang	Jl.KH.Salim no 1, Kab. Malang, Tajinan, Jatisari	

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Muhamad Santoso	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	kurangnya pengetahuan mengenai bumdes	Mulyoasri Bumdes amanah, Kab. Malang, Ampelgading, Mulyoasri	
15	Sudarman	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Pembentukan Pengurus Bumdes yang direncanakan tahun 2021 ini masih belum maksimal dalam menyusun manajemen pengelolannya, kami mengusulkan agar pengurus yang sudah dibentuk ini dapatnya diberikan pembekalan bagaimana mekanisme pengelolaan Bumdes agar dapat mengembangkan usaha di masing-masing unit pelaksanaannya. kami mengajukan usulan Bimtek pengembangan Bumdes ini 4 kali kegiatan	Pengurus Bumdes Desa Belung, Kab. Malang, Poncokusumo, Belung	
16	Khoirul Anam	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Dalam kurun waktu 3 tahun berdirinya BUMDES Desa Bayem belum didukung oleh pengelolaan manajemen keuangan dan pemasaran yang baik, untuk itu dibutuhkan pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan BUMDES menjadi yang lebih baik.	Desa Bayem, Kab. Malang, Kasembon, Bayem	
17	Jamburi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	Pemahaman TUPOKSI masing-masing lembaga	Jl. Raya RT 12 RW 2, Kab. Malang, Kepanjen, Sengguruh	
18	Mujiono	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	belum terbentuknya BUMDES di desa Druju	Desa Druju, Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Druju	
19	Nanang Triswoko	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	Peningkatan Kapasitas RT 46 orang dan RW 12 orang	Desa Tempursari, Kab. Malang, Donomulyo, Tempursari	
20	Sunarto	Pemberdayaan Masyarakat dan	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai	1	untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan atau administrasi	Desa Pait, Kab. Malang, Kasembon, Pait	

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Desa	pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb		kegiatan oleh PKK di Desa, karena selama ini administrasi Kegiatan PKK desa masih belum bisa maksimal.		
21	Suwito	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	SDM masih belum cukup berpengalaman	Jl Nailoen Hamam No 1 RT.13 RW.06 Dsn. Wonosari, Kab. Malang, Wonosari, Wonosari	
22	Fatah Syaifudin	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	perlu adanya bimbingan peningkatan sdm	dk aran arn rt 37 rw 10, Kab. Malang, Poncokusumo, Sumberejo	
23	H. Nurhadi Santoso	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Peningkatan Kapasitas Guru PAUD (Pernah diusulkan pada MUSRENBANGDes Tahun 2020 untuk kegiatan Tahun 2021 tapi belum terealisasi)	Desa Kasembon, Kab. Malang, Kasembon, Kasembon	
24	Heri Wibisono	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	Masih kurangnya pemahaman tentang tugas apa yang harus dijalankan sebagai perangkat desa.	Perangkat Desa dan BPD Desa Putukrejo, Kab. Malang, Kalipare, Putukrejo	
25	Krisno	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Kurangnya bimbingan, Pemahaman dan pengembangan	Jl. Sadru Rt 04 Rw 02, Kab. Malang, Kepanjen, Tegalsari	
26	Kuseri	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	Lembaga Desa Jombok yang minim pengetahuan baik dalam tugas maupun administrasi lembaga serta aturan-aturan mengenai lembaga	Desa Jombok, Kab. Malang, Ngantang, Jombok	

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					desa.		
27	Lily Alfiatul Jannah	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	penyeragaman tupoksi	Desa Sukorejo, Kab. Malang, Gondanglegi, Sukorejo	
28	Mochamad Sholeh	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus BUMDes	Malangsuko, Kab. Malang, Tumpang, Malangsuko	
29	Prayogi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Kapasitas / Kompetensi Anggota PKK perlu peningkatan	Desa Ngroto, Kab. Malang, Pujon, Ngroto	
30	Sugeng Rahayu	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Terlalu jarang adanya bimbingan dan pelatihan	Desa Tirtomoyo, Kab. Malang, Ampelgading, Tirtomoyo	
31	Sugiharto Puji W	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa Glanggang sebanyak 15 orang	Kantor Desa Glanggang, Kab. Malang, Pakisaji, Glanggang	
32	Suliyadi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	peningkatan kapasitas aparatur Desa Wonoagung keseluruhan	Desa Wonoagung, Kab. Malang, Tirtoyudo, Wonoagung	
33	Tukiran	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Lembaga Pkk sangat membutuhkan bimbingan teknis administrasi	Jl. Singajaya No4, Kab. Malang, Gondanglegi, Putat Kidul	
34	Zainul Arifin	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	Agar Perangkat Desa Lebih Memahami Tupoksi Masing masing	Kantor Desa Genengan, Kab. Malang, Pakisaji, Genengan	

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Abdul Ghofur	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	-	Belum terbentuknya BUMDES MOJOSARI	Desa Mojosari, Kab. Malang, Kapanjen, Mojosari	
36	Arianto	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengurus BUMDes	Desa Bokor, Kab. Malang, Tumpang, Bokor	
37	Hadi Susanto	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	Banyak perangkat desa Kambingan yang belum menguasai tupoksi masing-masing	Desa Kambingan, Kab. Malang, Tumpang, Kambingan	
38	Helmiawan Khodidi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang tupoksi masing masing perangkat	Dusun Krajan, Kab. Malang, Turen, Tumpukrenteng	
39	Helmiawan Khodidi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	-	belum berdirinya BUMDES dan kurangnya wawasan tentang BUMDES	Dusun Krajan, Kab. Malang, Turen, Tumpukrenteng	
40	Hosen	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	Kurangnya pemahaman TUPOKSI sesuai SOTK dari Perangkat Desa dan Kurang Paham Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, maka diperlukan bimtek terkaitTUPOKSI dan Pengelolaan Keuangan Desa	KANTOR DESA, Kab. Malang, Pagak, Sumberkerto	
41	Hudi Mariono	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	masih kurangnya pengetahuan BUMDes dalam menjalankan kegiatannya	Desa Tulusbesar, Kab. Malang, Tumpang, Tulusbesar	
42	Imam Mahmudi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	Karena kurangnya pemahaman tupoksi Perangkat Desa	Desa Arjosari, Kab. Malang, Kalipare, Arjosari	
43	Mohamad Bachri	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	Belum maksimal dalam penyusunan dan pengelolaan APBdesa. Perlu adanya pelatihan dalam penyusunan dan Pengelolaan APBdesa dengan memaksimalkan tupoksi perangkat desa sesuai dengan tupoksi PPKD.	Dusun Krajan RT 10 RW 3, Kab. Malang, Pagak, Sempol	
44	Mulyadi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	-	Meningkatkan SDM Pengurus Bumdes	Desa Tulungrejo, Kab. Malang, Ngantang, Tulungrejo	
45	Nanang Cahyono	Pemberdayaan Masyarakat dan	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan	3	Pelatihan IT dan pemaksimalan Tugas Pokok Fungsi untuk perangkat Desa	Desa Pandanrejo, Kab. Malang, Pagak,	

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Desa	tupoksi		Pandanrejo	Pandanrejo	
46	Nur Mahiriono	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Kurangnya kemampuan manajemen dan inovasi dalam pengelolaan BUMDES	Gubugklakah, Kab. Malang, Poncokusumo, Gubugklakah	
47	Nur Rohmat Sri Sanjaya	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes	Desa Dadapan, Kab. Malang, Wajak, Dadapan	
48	Siti Mu"awanah	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Kebutuhan Peningkatan SDM dan Manajemen yang baik	Kantor Desa Banjarsari, Kab. Malang, Ngajum, Banjarsari	
49	Slimuryanto	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelatihan pengelolaan keuangan desa	3	mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih Transparan dan Akuntabel	Sukowilangun, Kab. Malang, Kalipare, Sukowilangun	
50	Slimuryanto	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.	Sukowilangun, Kab. Malang, Kalipare, Sukowilangun	
51	Sugeng Rahayu	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	sangat di perlukan bimbingan dan pelatihan	Desa Tirtomoyo, Kab. Malang, Ampelgading, Tirtomoyo	
52	Sumiyati	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	perlu nya peningkatan kemampuan pengurus bundes	desa slamet, Kab. Malang, Tumpang, Slamet	
53	Sutrisno	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	karena bumdes baru terbentuk sehingga perlu adanya bimtek bumdes	desa Pringu, Kab. Malang, Bululawang, Pringu	
54	Tasuwati	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Belum maksimalnya kinerja pengurus BUMDes maka dari itu kami memohon untuk di adakan pelatihan	Desa Togorejo, Kab. Malang, Pagak, Tlogorejo	

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					pengurus BUMDes		
55	Budiono	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Peningkatan Kapasitas Bumdes	Desa Bangelan, Kab. Malang, Wonosari, Bangelan	
56	Hendrik Krisdyanto	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	untuk meningkatkan SDM dari lembaga yang ada di Desa	Desa Gedangan, Kab. Malang, Gedangan, Gedangan	
57	Johan Supriyadi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Peningkatan Sdm Pengurus Bumdes	Desa Banjarejo, Kab. Malang, Ngantang, Banjarejo	
58	Johan Supriyadi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	3	Bimtek Adminitrasi Lembaga Pkk, Kader Kesehatan	Desa Banjarejo, Kab. Malang, Ngantang, Banjarejo	
59	Johan Supriyadi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	Pelatihan Bagi Perangkat Desa Dalam Melaksanakan Tupoksi	Desa Banjarejo, Kab. Malang, Ngantang, Banjarejo	
60	Madkhoiri	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Administrasi Lembaga PKK yang kurang memahami dan Teratur	JL. Raya Wandanpuro No 318 Desa Wandanpuro, Kab. Malang, Bululawang, Wandanpuro	
61	Misdi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Pelatihan dan penguatan pengurus Bumdes dalam mengelola usaha yang ada di Desa , terutama bagaimana meningkatkan hasil usaha yang dimiliki desa dan mencari terobosan inovasi desa dan potensi desa untuk dijadikan sumber pendapatan asli Desa , pelatihan 3hari ,jumlah peserta pengurus bumdes dan pengurus sub unit bumdes 30 org , anggaran Rp.	Kedungsalam RT 08 Dusun Krajan, Kab. Malang, Donomulyo, Kedungsalam	

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					50.000.000		
62	Mu'asan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	Kurangnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa	Desa Pagak, Kab. Malang, Pagak, Pagak	
63	Muhadi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	Kurangnya Pengetahuan Tentang Tupoksi Masing-masing Perangkat	Jl. Jend. Sudirman 232 Sumberpucung, Kab. Malang, Sumberpucung, Sumberpucung	
64	Muhadi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Bumdes Masih Kurang Maksimal dalam mengelola hingga dibutuhkan bimtek	Desa Sumberpucung, Kab. Malang, Sumberpucung, Sumberpucung	
65	Muhyidin	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	perlu nya pelatihan semua perangkat desa agar dari masing masing perangkat mengetahui secara rinci tugas dari masing masing individu dan meningkatkan SDM pada umumnya	Desa Purwoharjo, Kab. Malang, Ampelgading, Purwoharjo	
66	Mulyoko Sudarsana	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Minimnya pengelolaan BUMDES	Desa Sidoluhur, Kab. Malang, Lawang, Sidoluhur	
67	Soelan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Masih kurangnya kapasitas tetang pengelolaan administrasi maka perlu pelatihan kader PKK	Desa Sidodadi, Kab. Malang, Gedangan, Sidodadi	
68	Sugeng	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Untuk lebih meningkatkan kualitas lembaga PKK di Kelurahan Kepanjen	Kelurahan Kepanjen, Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	
69	Sugeng Wicaksono	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Pengelolaan Bumdes Berjalan sesuai Harapan	Kantor Desa Bumirejo Jl Kavling I No 9 Desa Bumirejo, Kab. Malang, Dampit, Bumirejo	

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Sugeng Wicaksono	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	Perangkat Desa Belum Bekerja Sesuai dengan Tupoksinya	Kantor Desa Bumirejo Jl. Kavling I No. 9 Desa Bumirejo, Kab. Malang, Dampit, Bumirejo	
71	Suhariyanto	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	pelatihan pemberdayaan penanggulangan bencana	Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso, Kab. Malang, Karang Ploso, Ampeldento	
72	Sujud	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Karena Kepengurusan Bumdes Masih Terbilang Baru Dibentuk Dan Masih Perlu Bimbingan Agar Bumdes Di Desa Curungrejo Berkembang Dengan Baik	DESA CURUNGREJO, Kab. Malang, Kepanjen, Curungrejo	
73	Wiknyo	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Pemantapan dan pelatian kader-kader PKK Desa Tamansari	Desa Tamansari, Kab. Malang, Ampelgading, Tamansari	
74	Yadiono	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Peningkatan Kapasitas PKK	Desa Sonowangi, Kab. Malang, Ampelgading, Sonowangi	
75	Abi Mas"ut	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	supaya pengasmistrasian kegiatan PKK lebih tertib dan terkordinir	Tempat di Kantor PKK Rt 05 Rw 02, Kab. Malang, Gondanglegi, Sumberjaya	
76	Abi Mas"ut	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Belum mengerti tata cara pengelolaan Aset Desa dan potensi yang ada di Desa (Wisata,Pasar Desa, Bangsampah,perikanan,Gedung Desa)	Desa Sumberjaya, Kab. Malang, Gondanglegi, Sumberjaya	

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Ahmad Muslimin	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	BUMDES baru terbentuk dan masih dalam tahap pengembangan sehingga perlu adanya penguatan dalam pengelolaan	Desa Wringinanom, Kab. Malang, Poncokusumo, Wringinanom	
78	As'adurrofiq	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Peningkatan SDM	Desa Banjarejo, Kab. Malang, Pagelaran, Banjarejo	
79	H. Hasan Asy'ari	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Pembinaan Kader PKK Desa	Kantor Desa Gondanglegi Kulon, Kab. Malang, Gondanglegi, Gondanglegi Kulon	
80	Juma'ali	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	Peningkatan Kelembagaan Desa	desa pakisjajar, Kab. Malang, Pakis, Pakisjajar	
81	Samsul Huda	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tupoksi	3	Masih banyak yang kurang faham tentang tupoksi perangkat desa	Desa Kendalpayak, Kab. Malang, Pakisaji, Kendalpayak	
82	Sujoko	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Menambah pengetahuan pengurus dalam hal pengelelolan BUMDesa Donowarih	Desa Donowarih, Kab. Malang, Karang Ploso, Donowarih	
83	Sunarto	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	Semakin berkembagnya jaman yang di ikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat semua lembaga yang ada di desa mau tidak mau harus mengikuti perkembangan tersebut baik lembaga mulai dari tingkat RT,RW,LPMD dan seterusnya. Sehingga Membutuhkan pelatihan peningkatan kapasitas oleh dinas terkait.	Desa Pait, Kab. Malang, Kasembon, Pait	

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
84	Teguh Patriajati	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Organisasi/lembaga sudah lama tidak ada pembinaan	Desa bringin, Kab. Malang, Wajak, Bringin	
85	Hartono	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	Pelatihan peningkatan kapasitas LPMD dan Lembaga Desa lainnya yang bertujuan untuk memaksimalkan kerja lembaga desa dalam membantu tugas dari Pemerintahan Desa. Target Peserta pelatihan sebanyak 30 orang, diperkirakan menyerap dana sebesar Rp. 39.000.000	Desa Kaumrejo, Kab. Malang, Ngantang, Kaumrejo	
86	Tohari	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Di era digital sdm kurang menunjang	Desa Sukopuro, Kab. Malang, Jabung, Sukopuro	
87	Wiroso Hadi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	Peningkatan lembaga desa	Kantor desa pandanlandung, Kab. Malang, Wagir, Pandanlandung	
88	Wiroso Hadi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Peningkatan SDM lembaga	Kantor Desa Pandanlandung, Kab. Malang, Wagir, Pandanlandung	
89	Sujoko	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	sosialisai pembentukan BUMDesa dan Bimtek pengurus BUMDesa	23	Menambah pengetahuan pengurus dalam hal pengelelolan BUMDesa Donowarih	Desa Donowarih, Kab. Malang, Karang Ploso, Donowarih	
90	Sunarto	Pemberdayaan	pelatihan peningkatan kapasitas	1	Semakin berkembagnya jaman yang di	Desa Pait, Kab. Malang,	

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Masyarakat dan Desa	LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)		ikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat semua lembaga yang ada di desa mau tidak mau harus mengikuti perkembangan tersebut baik lembaga mulai dari tingkat RT,RW,LPMD dan seterusnya. Sehingga Membutuhkan pelatihan peningkatan kapasitas oleh dinas terkait.	Kasembon, Pait	
91	Teguh Patriajati	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Organisasi/lembaga sudah lama tidak ada pembinaan	Desa bringin, Kab. Malang, Wajak, Bringin	
92	Hartono	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	Pelatihan peningkatan kapasitas LPMD dan Lembaga Desa lainnya yang bertujuan untuk memaksimalkan kerja lembaga desa dalam membantu tugas dari Pemerintahan Desa. Target Peserta pelatihan sebanyak 30 orang,diperkirakan menyerap dana sebesar Rp. 39.000.000	Desa Kaumrejo, Kab. Malang, Ngantang, Kaumrejo	
93	Tohari	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb	1	Di era digital sdm kurang menunjang	Desa Sukopuro, Kab. Malang, Jabung, Sukopuro	
94	Wiroso Hadi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pelatihan peningkatan kapasitas LPMD, RT, RW, Lembaga Adat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	Peningkatan lembaga desa	Kantor desa Pandanlandung, Kab. Malang, Wagir, Pandanlandung	
95	Wiroso Hadi	Pemberdayaan Masyarakat dan	bimbingan administrasi lembaga PKK sosialisai	1	Peningkatan SDM lembaga	Kantor Desa Pandanlandung, Kab.	

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Desa	pembentukan/pemantapan rumah curhat, pembinaan BKB dan PAUD yang terintegrasi posyandu, pelatihan pembentukan/penguatan kelompok UP2K PKK, dsb			Malang, Wagir, Pandanlandung	

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang yaitu Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sesuai dengan arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yaitu :

- a. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- b. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :

- a. Masih adanya desa berkembang di Kabupaten Malang yang berpotensi menjadi desa maju;
- b. Masih perlu peningkatan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan pada desa berkembang;
- c. Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- d. Belum semua desa membentuk BUMDesa;
- e. BUMDesa yang sudah terbentuk masih perlu pembinaan untuk kemajuan BUMDesa;
- f. Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa;
- g. Belum optimalnya pengembangan potensi desa.

Dengan mengacu Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang yaitu Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan

Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Indikator tujuan :

Persentase Desa Maju.

b. Sasaran

Meningkatnya Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Indikator Sasaran :

Persentase Desa Berkembang yang Menjadi Desa Maju.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 5 Program, 12 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

3.3.2. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah;

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penyelenggaraan Penataan Desa;
10. Fasilitasi Kerjasama antar Desa;
11. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3.3.3 Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
12. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
14. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
15. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

17. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
18. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
19. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
20. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
21. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
22. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
23. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
24. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
25. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
26. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
27. Pengadaan Mebel;
28. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
29. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
30. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
32. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
34. Fasilitasi Tata Wilayah Desa;
35. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa;
36. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
37. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
38. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
39. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
40. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
41. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
42. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa;

43. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
44. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
45. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
46. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
47. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
48. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
49. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
50. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
51. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
52. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berlokasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa lokasi kegiatannya di 66 desa, masing-masing Kecamatan terdiri dari 2 desa;
- c. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa lokasi kegiatannya di 2 Kecamatan yang desa-desanya berpotensi dikembangkan menjadi kawasan perdesaan;
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa lokasi kegiatannya di 378 Desa;
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa lokasi kegiatannya di 390 Desa/Kelurahan;
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa kegiatannya di 75

desa;

- g. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga lokasi kegiatannya di 33 Kecamatan.

Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebesar Rp.9.499.542.732,00 (Sembilan milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang sumber dananya berasal dari :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU);
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Apabila rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/Sub Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, maka akan diadakan penyesuaian melalui Perubahan Rencana Kerja.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana tahun 2022							Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja					
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
2																			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	13										9,499,542,732					0			
2	13	01									6,868,740,932					0			
2	13	01	2,01								150,000,000					0			
2	13	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	100 %	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen RKA- SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0

2	13	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen DPA- SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	100 %	23.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dukungan manajemen	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal	Kab. Malang, Semua Kecamatan	100 %	4 Dokumen	Jumlah dokumen laporan hasil	100 %	73.000.000	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja	100 %	0

					perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah		penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Perangkat Daerah	Semua Kelurahan			evaluasi kinerja perangkat daerah		Alokasi Umum		perangkat daerah				
2	13	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,650,212,072				0	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	462 OB 462 OB	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	100 %	5,009,243,732	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	180 OB	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	100 %	632,395,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	135 Dokumen	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	100 %	2,382,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun sesuai aturan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0

2	13	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0	
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun	100 %	2,191,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0	
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										5,000,000					0
2	13	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0	
2	13	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0	
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										66,002,000					0
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas	Persentase pemenuhan	Jumlah pakaian dinas dan	Jumlah Pemenuhan	Persentase Pemenuhan	Kab. Malang,	100 %	65 Stel	Jumlah pakaian dinas	100 %	55,176,000	Dana Transfer	Persentase pemenuhan dukungan manajemen	100 %		

					Beserta Atribut Kelengkapannya	dukungan manajemen dan penunjang kinerja perangkat daerah	kelengkapannya yang disediakan	kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Layanan Internal Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dan kelengkapannya yang disediakan			Umum-Dana Alokasi Umum	perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah		0	
2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan dukungan manajemen dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 Dokumen	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan dukungan manajemen dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan dukungan manajemen dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	100 %	2,826,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										603,892,500					0
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen	Persentase pemenuhan	Jumlah komponen	Jumlah pelayanan	Persentase Pemenuhan	Kab. Malang,	100 %	31 Buah	Jumlah komponen	100 %	2,940,000	Dana Transfer		Persentase pemenuhan dukungan manajemen	100 %	

					Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	memenuhi administrasi umum perangkat daerah sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Layanan Internal Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan			Umum-Dana Alokasi Umum	perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah		0
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1950 Buah	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	100 %	69,456,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	32000 Buah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 %	23,323,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	446 Eksemplar	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	100 %	6,244,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase pemenuhan dukungan manajemen	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi	Persentase Pemenuhan Layanan Internal	Kab. Malang, Semua Kecamatan	100 %	600 HOK	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	100 %	499,929,000	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja	100 %	0

					SKPD	perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah		umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Perangkat Daerah	Semua Kelurahan			yang difasilitasi			Alokasi Umum		perangkat daerah		
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen arsip dinamis pada Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2500 Dokumen	Jumlah dokumen arsip dinamis pada Perangkat Daerah	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										67,588,000					0
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	100 %	27,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah mebel yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	32 Unit	Jumlah mebel yang diadakan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0

2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	100 %	19,918,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										248,877,360					0
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah jasa pengiriman surat yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2500 OK	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	100 %	13,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0	
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13512 OK	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100 %	235,002,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										77,169,000					0
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Unit	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	100 %	61,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	0	

2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA								154,000,000					0	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa								154,000,000					0	
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pendampingan pengembangan kawasan perdesaan	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Desa	Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pendampingan pengembangan kawasan perdesaan	65.34 %	154,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100 %	0
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								1,311,801,800					0	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								1,311,801,800					0	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	65.34 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100 %	0
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	66 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	65.34 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100 %	0
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	66 Desa	Jumlah pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan desa	65.34 %	29,881,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100 %	0
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	378 Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	65.34 %	265,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100 %	0

2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah desa pelatihan aparatur pemerintahan desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	378 Desa	Jumlah desa pelatihan aparatur pemerintahan desa	65.34 %	283,396,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100 %	0		
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah BUMDesa Bersama yang dibina Jumlah BUMDesa yang dibina	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	29 Unit 75 Desa	Jumlah BUMDesa Bersama yang dibina Jumlah BUMDesa yang dibina	65.34 %	281,524,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100 %	0		
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan kepala desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan kepala desa	65.34 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100 %	0		
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah data profil desa/kelurahan yang valid Pemutakhiran data indeks desa membangun (IDM)	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	390 Desa/Kelurahan 378 Desa	Jumlah data profil desa/kelurahan yang valid dan Pemutakhiran data indeks desa membangun (IDM)	65.34 %	167,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100 %	0		
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah aset desa yang didata	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75 Desa	Jumlah aset desa yang didata	65.34 %	94,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100 %	0		

2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Desa	Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	65.34 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100 %	0
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										1,125,000,000				0
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										1,125,000,000				0
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Jumlah desa Bimbingan Teknis LKD Jumlah Fasilitasi Kader Pembangunan Manusia Jumlah Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Jumlah pembinaan lembaga adat desa	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Desa 378 Desa 33 Desa 10 Desa	Jumlah desa Bimbingan Teknis LKD Jumlah Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Jumlah pembinaan lembaga adat desa, Jumlah Fasilitasi Kader Pembangunan Manusia	65.34 %	310,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100 %	0
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa Jumlah Pelatihan Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Desa 6 Desa 8 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa Jumlah Pelatihan Pengembangan Usaha Sektor	65.34 %	280,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100 %	0

					an Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	an Desa dan Lembaga Adat Desa		atan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarak atan dalam pemberdaya an masyarakat.		Semua Kelurahan			PKK Kabupaten					dan Lembaga Adat Desa		
Total														9,499,542,732					0	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, baik yang bersifat teknokratis, top down, buttom up maupun politis. Rencana kerja yang bersifat teknokratis berasal dari rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan target-target kinerja yang akan dicapai selama periode Renstra. Rencana kerja yang bersifat top down, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir program-program dari Instansi Vertikal seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rencana kerja yang bersifat buttom up, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan dari pemerintah desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan yang dimasukkan pada aplikasi e Musrenbang. Sedangkan Rencana kerja yang bersifat politis merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Malang.

Pendanaan dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2022, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Tahun 2022**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana tahun 2022							Catatan Penting			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										9,499,542,732				
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,868,740,932			
2	13	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										150,000,000		
2	13	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	22.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	13	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	13	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran	Persentase Pemenuhan Layanan Internal	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	100 %	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

					perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	ketentuan dan tepat waktu	n dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Perangkat Daerah	Semua Kelurahan			n dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu				
2	13	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen DPA- SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran n dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran n dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	13	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran n dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran n dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	13	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran n dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran n dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	23.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	13	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran n dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran n dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	73.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	13	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,650,212,072	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dukungan	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	Jumlah pemenuhan kinerja	Persentase Pemenuhan Layanan	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	100 %	462 OB 462 OB	Jumlah pemenuhan kinerja	100 %	5,009,243,732	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2	13	01	2.02	01		manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	peayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	Internal Perangkat Daerah	Semua Kelurahan			peayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat				
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	180 OB	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	100 %	632,395,340	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	135 Dokumen	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	100 %	2,382,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	13	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Dokumen	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan	100 %	2,191,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

								dan tepat							dan tepat			
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										5,000,000			
2	13	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen rencana barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
2	13	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										66,002,000			
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 Stel	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	55,176,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 Dokumen	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		

2	13	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Dokumen	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	2,826,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											603,892,500	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	31 Buah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	2,940,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1950 Buah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	69,456,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan	Persentase pemenuhan	Jumlah barang cetakan dan	Jumlah pelayanan	Persentase Pemenuhan	Kab. Malang, Semua	100 %	32000 Buah	Jumlah pelayanan	100 %	23,323,000	Dana Transfer Umum- Dana

					Penggandaan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	penggandaan yang disediakan	pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan			pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar			Alokasi Umum		
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	446 Eksemplar	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	6,244,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	600 HOK	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	499,929,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen arsip dinamis pada Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2500 Dokumen	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									67,588,000			
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen	Jumlah kendaraan dinas operasional/lap	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam	Persentase Pemenuhan Layanan Internal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua	100 %	1 Unit	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam	100 %	27,670,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

					perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	angan yang diadakan	menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Perangkat Daerah	Kelurahan			menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar					
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah mebel yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	32 Unit	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	19,918,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										248,877,360		
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2500 OK	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	13,875,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13512 OK	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun	100 %	235,002,360	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

					daerah		sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar					sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar					
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										77,169,000		
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Unit	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	61,150,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	6,019,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA										40,000,000		
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa										40,000,000		
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Jumlah desa yang difasilitasi pembuatan tugu	Jumlah Fasilitasi Tata Wilayah	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	100 %	33 Desa	Jumlah Fasilitasi Tata Wilayah	65.34 %	20,000,000	PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)	

						tapal batas desa	dan Penataan Kewenangan Desa		Semua Kelurahan			dan Penataan Kewenangan Desa						
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Jumlah monitoring dan evaluasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Fasilitasi Tata Wilayah dan Penataan Kewenangan Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Desa	Jumlah Fasilitasi Tata Wilayah dan Penataan Kewenangan Desa	65.34 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA											154,000,000		
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa											154,000,000		
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pendampingan pengembangan kawasan perdesaan	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	65.34 %	154,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											1,311,801,800		
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa											1,311,801,800		
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	65.34 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	66 Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	65.34 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	66 Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	65.34 %	29,881,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	378 Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	65.34 %	265,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

								Pemerintah Desa						Pemerintah Desa				
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										1,125,000,000			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										1,125,000,000			
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Jumlah desa Bimbingan Teknis LKD Jumlah Fasilitasi Kader Pembangunan Manusia Jumlah Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Jumlah pembinaan lembaga adat desa	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Desa 378 Desa 33 Desa 10 Desa	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.	65.34 %	310,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa Jumlah Pelatihan Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Desa 6 Desa 8 Desa	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.	65.34 %	280,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Jumlah desa pemanfaat/ penerima bantuan peralatan TTG Jumlah Workshop TTG Sosialisasi Posyantek	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Desa 1 Kali 1 Kali	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.	65.34 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Lembaga	Jumlah laporan swadaya masyarakat	Jumlah Pembinaan Lembaga	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	100 %	33 Kecamatan	Jumlah Pembinaan Lembaga	65.34 %	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

					Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	pada BBGRM dan Jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun	Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.		Semua Kelurahan			Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.					
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas LKD dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kali	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.	65.34 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Jumlah pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.	Persentase Desa Maju	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Kali	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.	65.34 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Total														9,499,542,732		0	

Tabel 4.2
Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana tahun 2022							Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	I		II		III		IV					
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	13										9,499,542,732													
2	13	01									6,868,740,932		25%	1.717.185.225	25%	1.717.185.225	25%	1.717.185.225	25%	1.717.185.225				
2	13	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					150,000,000		25%	37.500.000	25%	37.500.000	25%	37.500.000	25%	37.500.000				
2	13	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25%	55.000.000	25%	55.000.000	25%	55.000.000	25%	55.000.000
2	13	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang	Jumlah dokumen RKA- SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25%	2.000.000	25%	2.000.000	25%	2.000.000	25%	2.000.000

2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah sesuai aturan dan tepat	Persentase Pemenuhan Layanan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	135 Dokumen	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	100 %	2,382,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25%	595.500	25%	595.500	25%	595.500	25%	595.500
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	Persentase Pemenuhan Layanan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25%	750.000	25%	750.000	25%	750.000	25%	750.000
2	13	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	Persentase Pemenuhan Layanan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25%	250.000	25%	250.000	25%	250.000	25%	250.000
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	Persentase Pemenuhan Layanan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Dokumen	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	100 %	2,191,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25%	547.750	25%	547.750	25%	547.750	25%	547.750
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									5,000,000		25%	1.250.000	25%	1.250.000	25%	1.250.000	25%	1.250.000	

																							0	
2	13	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25%	375.000	25%	375.000	25%	375.000	25%	375.000
2	13	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25%	875.000	25%	875.000	25%	875.000	25%	875.000
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								66,002,000		25%	16.500.500	25%	16.500.500	25%	16.500.500	25%	16.500.500		
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 Stel	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	55,176,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25%	13.794.000	25%	13.794.000	25%	13.794.000	25%	13.794.000

2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	dengan benar Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 Dokumen	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25%	750.000	25%	750.000	25%	750.000	25%	750.000
2	13	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Dokumen	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25%	125.000	25%	125.000	25%	125.000	25%	125.000
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi	100 %	2,826,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25%	706.500	25%	706.500	25%	706.500	25%	706.500

					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	n dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Perangkat Daerah	Kelurahan			daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar			Alokasi Umum								
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	10.000.000				
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100 %	6,019,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25%	1.504.750	25%	1.504.750	25%	1.504.750	25%	1.504.750

2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA								40,000,000		25%	10.000.000	25%	10.000.000	25%	10.000.000	25%	10.000.000	25%	10.000.000
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa								40,000,000		25%	10.000.000	25%	10.000.000	25%	10.000.000	25%	10.000.000	25%	10.000.000
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Jumlah desa yang difasilitasi pembuatan tugu tapal batas desa	Jumlah Fasilitasi Tata Wilayah dan Penataan Kewenangan Desa	Persentase Desa Berkembang	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Desa	Jumlah Fasilitasi Tata Wilayah dan Penataan Kewenangan Desa	10.67%	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25%	5.000.000	25%	5.000.000	25%	5.000.000	25%	5.000.000
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Jumlah monitoring dan evaluasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Fasilitasi Tata Wilayah dan Penataan Kewenangan Desa	Persentase Desa Berkembang	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Desa	Jumlah Fasilitasi Tata Wilayah dan Penataan Kewenangan Desa	10.67%	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25%		25%		25%		25%	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA								154,000,000		25%	38.500.000	25%	38.500.000	25%	38.500.000	25%	38.500.000	25%	38.500.000
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa								154,000,000		25%	38.500.000	25%	38.500.000	25%	38.500.000	25%	38.500.000	25%	38.500.000

2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pendampingan pengembangan kawasan perdesaan	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persentase Desa Berkembang	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	10.67%	154,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25%	38.500.000	25%	38.500.000	25%	38.500.000	25%	38.500.000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA										1,311,801,800		25%	327.950.450	25%	327.950.450	25%	327.950.450	25%	327.950.450
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										1,311,801,800		25%	327.950.450	25%	327.950.450	25%	327.950.450	25%	327.950.450
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa Berkembang	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	10.67 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25%	5.000.000	25%	5.000.000	25%	5.000.000	25%	5.000.000
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa Berkembang	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	66 Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	10.67 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25%	5.000.000	25%	5.000.000	25%	5.000.000	25%	5.000.000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa Berkembang	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	66 Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	10.67 %	29,881,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25%	7.470.250	25%	7.470.250	25%	7.470.250	25%	7.470.250
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase fasilitasi dan pembinaan	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa Berkembang	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	378 Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan	10.67 %	265,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25%	66.250.000	25%	7.470.250	25%	7.470.250	25%	7.470.250

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Rencana tindak lanjut jika dalam proses pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka akan dilaksanakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan mekanisme mengusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI